

**STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL
BERBASIS EDU-EKOWISATA DALAM MENGEMBANGKAN PAGUYUBAN
NELAYAN PAKULIMA DI KAWASAN PESISIR BESUKI SITUBONDO**¹Maskuri, ²Hambali, ³Agus Sulthoni Imami¹Unisma Indonesia, ^{2,3}Universitas Nurul Jadid Indonesia¹masykuri@unisma.ac.id, ²hambali.amien@gmail.com, ³djdjenar@gmail.com**Abstrak**

Paradigma Pendidikan Islam multikultural (PAIM) adalah ajaran Agama Islam yang menekankan pada sikap toleransi, rukun, moderat, dan kesediaan dialog dalam perbedaan. Realitas bangsa Indonesia yang plural membutuhkan paradigma yang mampu membingkai keberagaman sehingga sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan Paguyuban Paku Lima sebagai komunitas nelayan melalui edu-ekowisata untuk mendukung ekonomi lokal, pendidikan keagamaan, dan mediasi konflik multikultural di Dusun Mandaran Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Tujuan pengembangan komunitas masyarakat pesisir ini adalah untuk menghasilkan peluang ekonomi, untuk meningkatkan pendidikan moderasi nelayan dengan memanfaatkan kawasan pesisir pantai sebagai destinasi wisata. Sektor edu-ekowisata Pendidikan Agama Islam Multikultural (PAIM) adalah strategi pengembangan paguyuban yang memadukan pendidikan berorientasi multikultural dengan sektor wisata pantai dan perikanan, selain hal itu pengembangan edu-ekowisata perspektif PAIM menjadikan paguyuban komunitas nelayan ini sebagai wahana kerukunan dan juga berperan sebagai mediator konflik horizontal antar etnis masyarakat sekitar antara masyarakat Mandaran dan masyarakat di luar Mandaran dalam menyelesaikan masalah.

Katakunci: Pendidikan Agama Islam Multikultural; Paguyuban Nelayan; Edu-Ekowisata

Abstract

The paradigm of multicultural Islamic education (PAIM) is the teaching of Islamic religion that emphasizes tolerance, harmony, moderation, and dialogue among different people. The fact that Indonesian nation is plural requires a paradigm that is able to frame diversity in accordance with the principle of Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal Ika). This research was conducted in order to answer the question of how to develop Paguyuban Paku Lima as a fishing community through edu-ecotourism to support the local economy, religious education, and mediation of multicultural conflicts in Mandaran Hamlet, Pesisir Village, Besuki District, Situbondo Regency. The purpose is to develop coastal communities through generating economic opportunities, increasing fishermen moderation education, and utilizing coastal areas as tourist destinations. The multicultural Islamic Education (PAIM) edu-ecotourism sector is a community development strategy that combines multicultural-oriented education with the coastal tourism and fisheries sector. The multicultural Islamic education based edu-ecotourism is to make this fishing community into a vehicle for harmony and conflict mediator among ethnic communities inside Mandaran people and communities outside Mandaran.

Key words: multicultural Islamic education; fisherman community; edu-ecotourism

Pendahuluan

Kawasan pesisir yang hanya mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber pendapatan, seperti Dusun Mandaran, belum memiliki banyak kemajuan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial mereka. Produktivitas ekonomi mereka dipengaruhi oleh menurunnya jumlah sumber daya perikanan potensial yang disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan, kurangnya informasi prakiraan cuaca, dan kurangnya teknologi pencari ikan. Sejak 2015, masalah serupa pernah terjadi di Dusun Mandaran Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Probolinggo. Pendapatan desa yang berkurang ini bahkan membuat mereka dalam keadaan kemiskinan. Penandaan pembangunan ekonomi Dusun Mandaran merupakan contoh yang membuktikan bagaimana satu sektor ekonomi dapat mempengaruhi aspek fundamental masyarakat lokal. Oleh karena itu, masyarakat desa membutuhkan alternatif sektor yang dapat dieksplorasi untuk mendukung sektor perikanan dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi desa berkelanjutan.

Studi ini dilakukan karena beberapa alasan. *Pertama*, secara umum, masyarakat kawasan pesisir menghadapi situasi kemiskinan yang mempersulit pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih baik. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2018), jumlah rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan (tangkap, perairan umum, dan budidaya) mencapai 964.231 atau 1,5% dari total rumah tangga nasional. Jumlah keseluruhan rumah tangga nelayan yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebesar 72,21%, sedangkan pendapatan per kapita rumah tangga nelayan tangkap sebesar Rp737,030. Pendapatan rumah tangga nelayan tangkap per tahun sebesar Rp3.030.200. Data ini menunjukkan bahwa kapasitas sosial ekonomi rumah tangga nelayan relatif terbatas. Dalam kasus Dusun Mandaran, sejak 2015 hingga kini 2017, nelayan setempat masih menghadapi kesulitan dalam hal menangkap ikan karena kelangkaan potensi perikanan di perairan setempat. Akibatnya, tingkat pendapatan dan kesejahteraan terdampak langsung.

Kedua, hingga Agustus 2018, kegiatan pengembangan komunitas nelayan dan ekonomi perikanan tangkap dalam bingkai ekowisata telah berjalan sinergis, namun tidak ada cetak biru tentang sinergitas dengan dunia pendidikan, khususnya pendekatan pendidikan eduwisata yang moderat. Lembaga sosial kemasyarakatan yang semestinya mengelola dinamika sosial komunitas masyarakat pesisir juga belum dibangun. Kondisi tersebut akan mempersempit fungsi kelembagaan komunitas Nelayan.

Ketiga, perubahan sosial ekonomi berlangsung pesat di Dusun Mandaran, karena lokasinya yang strategis. Area ini diantisipasi akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan,

karena sangat strategis dengan corak ragam budaya masyarakat sebagai daerah eks-karisedenan di sebelah utara Kecamatan Besuki yang menjadi salah satu pusat ekonomi kota Situbondo. Dalam situasi seperti ini, warga Dusun Mandaran juga diharapkan siap dan mampu mengikuti percepatan pembangunan kawasan tersebut. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mengalami perkembangan ekonomi sebagai akibat dari ekspansi perkotaan.¹ Percepatan pembangunan ini tentunya berimbas pada terbentuknya karakter masyarakat industri yang orientasi terhadap kebahagiaan material lebih besar dibandingkan dengan kebahagiaan immaterial, sebagaimana kebahagiaan masyarakat agraris, yang lebih menekankan pada kerukunan, kasih sayang dan saling menghormati.

Mempertimbangkan alasan di atas, penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan kelembagaan komunitas Nelayan dengan edukowisata moderasi keagamaan perspektif PAIM untuk membentuk masyarakat yang moderat, dan selanjutnya mendukung ekonomi lokal Dusun Mandaran melalui pembangunan paguyuban komunitas nelayan setempat. Jenis pengembangan yang sama telah diterapkan di Izola, Eropa Selatan.² Tujuan pengembangan komunitas ini adalah untuk menghasilkan peluang ekonomi yang meningkatkan pendapatan nelayan, untuk mengharmonisasi dinamika sosial kemasyarakatan, dan untuk memanfaatkan kawasan pesisir pantai. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi nelayan, (2) untuk mendapatkan gambaran dinamika aktivitas paguyuban Nelayan, dan (3) untuk mencapai gambaran strategi pengembangan Paguyuban melalui edu-ekowisata moderasi keagamaan perspektif PAIM, yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan untuk mengatasi konflik nelayan yang sering terjadi di wilayah pesisir.

Kerangka teoritik

1. Keterbatasan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Permasalahan keterbatasan ekonomi atau kemiskinan di masyarakat nelayan merupakan persoalan serius yang masih terjadi saat ini, dan belum ditangani dengan baik. Modernisasi perikanan pada tahun 1970-an sering dipandang sebagai penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial di antara masyarakat nelayan.³ Dalam perkembangan selanjutnya,

¹ Yunus HS (2008) *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

² Rogelja N (2002) The ethnography of local tourism: Connections between fishery and tourism in Izola. *Journal of Maritime Anthropological Studies*, 1 (1):85-102.

³ Mubyarto, Soetrisno L, & Dove M (1984) *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali Pers.

faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan pada nelayan menjadi lebih rumit. Misalnya, penghancuran ekosistem pesisir laut dan proses penangkapan ikan, yang merusak lingkungan karena penggunaan bom ikan dan kalium. Penghancuran ekosistem telah mengurangi tingkat pendapatan nelayan.⁴ Selain itu, perubahan iklim, kurangnya teknologi berkualitas tinggi, dan akses pasar yang tidak setara memperburuk situasi dan menyebabkan kemiskinan nelayan.⁵ Faktor lain yang juga dilibatkan adalah kualitas SDM nelayan, sistem bagi hasil eksploitatif, dan keterikatan utang dengan pedagang perantara.⁶

Sejak 2015 hingga 2017, nelayan tradisional di Mandaran telah bertemu dengan kesulitan dalam kaitannya dengan penangkapan ikan. Kesulitan seperti itu telah terjadi sepanjang tahun, termasuk selama musim penangkapan ikan (musim Barat dan Timur). Ketika musim penangkapan ikan masih berjalan secara teratur bertahun-tahun yang lalu, para nelayan hanya mengalami kesulitan memancing antara Mei dan September, di musim Timur. Sebaliknya, musim Barat yang terjadi antara September dan April adalah waktu terbaik bagi mereka untuk pergi memancing. Apalagi para nelayan sering menghadapi kendala saat berlayar ke laut. Misalnya, gelombang besar dan gales yang tiba-tiba. Menurut para nelayan, kondisi iklim laut telah kehilangan keteraturannya dan ini menyulitkan mereka untuk mengantisipasinya.

Kondisi potensi sumber daya perikanan mulai menurun sejak 2009. Selama ini, para nelayan yang tinggal di Dusun Mandaran mulai meninggalkan laut dan mencari alternatif peluang untuk bekerja di darat. Demikian pula dari Juli hingga Agustus 2017, para nelayan yang tidak melaut mencari pekerjaan lain. Misalnya dengan menjadi kuli bangunan dan pekerja konstruksi di lokasi pembangunan Daerah Besuki atau di tempat lain. Mereka juga menjadi buruh tani atau pekerja *fishpond*. Sebagian besar yang lain tidak bekerja, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para istri nelayan harus masuk ke dalam utang ketika dibantu oleh kerabat dan tetangga mereka, atau menjual harta berharga mereka.

Dalam kegiatan yang berkaitan dengan laut, tingkat pendapatan yang diperoleh tidak dapat dipastikan, seperti yang dilaporkan oleh nelayan tangkap. Misalnya, pada satu hari

⁴ Ismail Z (2003) *Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: P2E-LIPI.

⁵ Muqtafa MK & Nadila SM (2011) Climate change dan dampaknya terhadap komunitas nelayan dan masyarakat hutan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 13:151-167.

⁶ Kusnadi (2016) Membangun Desa Pesisir Membangun Negara Maritim Indonesia. In: A Abdurrahim. *Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 41-56.

pada Agustus 2017, Harori melaut dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp30.000. Biaya penangkapan ikan terdiri dari dua liter bensin – Rp20.000 dan rokok – Rp5.000, sehingga totalnya Rp25.000. Penghasilan yang tersisa sebesar Rp5.000. Sehari sebelumnya, ia belum mendapatkan uang. Karena penghasilan kecil yang ia dapatkan, ia berhenti memancing untuk sementara waktu dan bekerja sebagai kuli bangunan. Upah harian yang diperolehnya sebesar Rp80.000 per hari dan ini secara kumulatif diberikan setiap akhir pekan. Sebagai pekerja konstruksi, upahnya Rp70.000 per hari. Sebagian besar nelayan Mandaran masuk ke dalam kondisi ini tanpa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi rumah tangga secara menyeluruh.

Kecilnya jumlah pendapatan menyulitkan para nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata kebutuhan keluarga kecil 4 atau 5 orang setiap harinya adalah Rp40.000 hingga Rp50.000. Menurut Widodo ada beberapa indikator untuk mengukur kemiskinan nelayan. *Pertama*, ada tingkat pendapatan yang rendah dan ketidakpastian jumlah yang mereka peroleh. *Kedua*, adalah terbatasnya jumlah makanan bergizi yang mampu mereka beli dan makan. *Ketiga*, adalah rumah yang kurang layak untuk ditinggali dan hanya memiliki perabotan terbatas. *Keempat*, adalah kondisi di mana nelayan tidak memiliki aset produksi. *Kelima*, adalah kurangnya kepemilikan kendaraan untuk transportasi. Rata-rata nelayan di Dusun Mandaran sudah memiliki rumah layak huni. Namun, hal ini tidak dapat memastikan kemampuan ekonomi mereka. Fakta di atas menunjukkan bahwa memancing sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa tidak lagi dapat diandalkan. Perubahan iklim dan berkurangnya potensi sumber daya perikanan di wilayah berbasis air merupakan tanda kondisi alam yang berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.⁷

Keadaan kemiskinan berdampak serius pada masa depan nelayan dan keberadaan kawasan pesisir sebagai tempat menjalankan kegiatan ekonomi. Kendati demikian, kemampuan nelayan dalam menahan berbagai tekanan sosial ekonomi merupakan aspek berharga yang mendukung kondisi mereka. Selain itu, ada lembaga lokal yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan, sementara lembaga lain melestarikan kemiskinan. Dengan demikian, lembaga yang membawa dampak positif perlu diperkuat

⁷ Suyanto B (2011) Mekanisme survival, identifikasi kebutuhan, dan pemberdayaan nelayan miskin dalam masa krisis akibat kenaikan harga BBM. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 24 (1):74-83.

untuk membantu mengatasi kesulitan sosial ekonomi.⁸ Selain itu, inisiatif lokal yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan nelayan menghadapi kemiskinan juga perlu dikelola dengan baik.

Selain masalah sosial ekonomi yang terjadi, para nelayan juga peduli terhadap abrasi laut yang dapat mengikis wilayah pesisir. Sejak 1970-an, garis pantai Mandaran telah mundur sekitar 2,5 kilometer. Para nelayan mengharapkan pemerintah Kabupaten Situbondo membangun pemecah gelombang di daerah pesisir untuk menahan abrasi laut. Jika masalah ini tidak segera diatasi, garis pantai yang tersisa dapat benar-benar hancur oleh abrasi laut dan membahayakan rumah tangga nelayan di dusun Pacemengan. Ini akan menyebabkan masalah sosial baru.

2. Dinamika Edu-Ekowisata Paguyuban Paku Lima

Edu-ekowisata laut adalah wisata alam yang mengandalkan keindahan pantai dan laut yang berbasis komunitas, dan melibatkan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan. Edu-ekowisata laut merupakan wisata edukatif, karena berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam.⁹ Ada empat dimensi minat yang mendukung kegiatan edu-ekowisata laut, yaitu keberlanjutan sumber daya alam, kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu pendukung. Dimensi-dimensi yang menarik ini adalah pilar keberlanjutan kegiatan komunitas nelayan. Wisata ini mengundang semua pihak –terutama anggota masyarakat– untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya.

Edu-ekowisata adalah kemasan wisata yang memadukan konsep wisata yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan dan peningkatan pendapatan. Kemasan yang disajikan pun sangat sederhana tetapi memiliki bobot edukasi yang penting, seperti berwisata di desa-desa adat atau penjelasan mengenai pelestarian ekosistem laut. Pengembangan edu-ekowisata juga akan sejalan dengan proses pemberdayaan masyarakat. Dimana dengan dibukanya suatu daerah sebagai suatu kawasan edu-ekowisata secara otomatis masyarakat yang ada didalamnya akan lebih diberdayakan dengan program-

⁸ Humaedi MA (2011) Mematahkan pewarisan kemiskinan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 13: 83-110.

⁹ Tuwo A (2011) *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut: Pendekatan Sosial-ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Sidoarjo: Brillan Internasional.

program pengembangan daerah wisata. Di sisi lain kearifan lokal masyarakat juga akan lebih terjaga bahkan lebih dari itu, budaya masyarakat dapat disosialisasikan secara lebih luas. Kearifan lokal sebagai aset pariwisata terbukti telah menyukseskan beberapa desa wisata.¹⁰

Edu-ekowisata perspektif PAIM menghendaki kualitas pengalaman belajar yang dapat mengimplementasikan sikap multikultural yang mampu berkerjasama, terbentuknya solidaritas, mandiri, tertanamnya rasa empati, toleransi beragama dan kecakapan hidup guna membentuk afektif dan psikomotor yang moderat guna meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Prinsip-prinsip kegiatan edu-ekowisata dirancang berpusat pada peserta; mengembangkan kreativitas; menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang; bermuatan nilai, etika, estetika, dan logika, dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pendidikan yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Masyarakat pesisir mulai banyak mengembangkan kegiatan ekowisata laut yang terintegrasi dalam kegiatan pendidikan. Tujuan integrasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga harmonisasi dinamika sosial kemasyarakatan. Masyarakat desa telah menjadi pelaku ekonomi dengan terlibat dalam pengembangan lembaga dengan edu-ekowisata. Hal ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian alam. Pengelolaan ekowisata dapat dilihat di Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.¹¹

Model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang dilihat WTO sebagai kegiatan pariwisata berkelanjutan adalah Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat.¹² Kegiatan pariwisata ekonomi tidak hanya terbatas pada bidang ekowisata, tetapi mereka juga fokus pada kesempatan untuk mencari

¹⁰ Suyanto, Edy, Fx Wardiyono, Tri Wuryaningsih, dan Tri Rini Widyastuti. (2018) “Model Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Dan Potensi Lokal Kampung Laut Segara Anakan *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII* (November): 8–16

¹¹ Kartodiharjo H & Jhamtani H (2006) *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.

¹² Hartono T (2005) Pengalaman Kemitraan, Pengelolaan, dan Pemasaran Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal: Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. In: J Damanik, HA Kusworo, & DT Raharjana (eds). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, 82-91.

peluang bisnis alternatif bagi masyarakat setempat tanpa menghancurkan hutan. Selain itu, manajemen juga fokus membangun kemitraan dengan berbagai instansi dan masing-masing mitra usaha harus berkontribusi dalam peningkatan kegiatan ekowisata berbasis masyarakat. Selanjutnya, saat melakukan kegiatan ekowisata, pemerintah tidak boleh merampas sumber kehidupan masyarakat setempat dengan menggunakan "konservasi alam" sebagai alasannya, seperti di Taman Wisata Alam, Ruteng, Flores Barat. Masyarakat mengandalkan sumber daya hutan di sekitar mereka untuk hidup.¹³

Ada kajian penelitian yang dilakukan Cole yang mencoba memahami penerapan dua konsep dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu partisipasi masyarakat lokal dan pemerataan pendapatan di Ngada, Flores. Dalam praktiknya, kedua konsep ini tidak mudah diwujudkan. Menurut warga setempat, kegiatan pariwisata dipandang positif, karena kegiatan ini mampu menjaga dan memperkuat nilai-nilai tradisional. Sisi positifnya telah dibuktikan dengan semakin banyaknya rumah adat, reparasi Bhaga dan Ngadu, serta penerapan kembali sistem stratifikasi sosial adat. Menurut Cole, adat istiadat setempat yang cenderung hierarki budaya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pariwisata, untuk mencegah kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian, kita juga membutuhkan pemahaman bersama untuk menciptakan situasi kondusif yang mendukung pemerataan pendapatan. Dengan demikian, sebuah tradisi harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat dibuat dan diciptakan kembali dengan menyesuaikan dengan waktu.¹⁴

Selain layanan pendidikan edu-ekowisata bahari yang disediakan oleh anggota komunitas paguyuban, Masyarakat pesisir juga dapat mengambil bagian dalam ekowisata dengan bekerja di warung seafood bakar di tepi laut Dusun Mandaran. Ada 4 kios yang berjajar dari Utara ke Selatan Pantai Mandaran. Kios-kios ini dibangun di atas lahan di mana hak atas tanah dibagi antara pemerintah desa dan asosiasi nelayan setempat. Warung seafood buka mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB. Warung-warung ini menjual berbagai jenis ikan, seperti kerapu, potihan, kakap hitam, kakap putih, baronang, dan bawal, dengan ukuran minimal 3,3 ons untuk setiap ikan. Konsumen lebih memilih membeli berbagai

¹³ Erb M (2001) Eco-tourism and environmental conservation in Western Flores: Who Benefits?. *Antropologi Indonesia*, 24 (66):72-88.

¹⁴ Adams KM (1997) Ethnic tourism and the renegotiation of tradition in Tana Toraja, Sulawesi, Indonesia. *Ethnology*, 36 (4):309-320.

jenis ikan dalam porsi satu kilogram sejak mereka datang berkelompok. Untuk satu kilogram ikan, kisaran harganya mulai dari Rp70.000 hingga Rp80.000.

Pengunjung Pantai Mandaran biasanya berasal dari kota-kota kecil atau kelurahan di wilayah Kabupaten Situbondo. Musim puncak untuk Pantai Mandaran yang akan dikunjungi adalah Idul Fitri. Pengunjung datang dalam kelompok kecil yang berjumlah sekitar 15 hingga 20 orang. Pada musim puncak, warung seafood dapat menjual lebih dari 100 kilogram ikan per hari, sedangkan pada hari-hari biasa, mereka hanya menjual sekitar 15 kilogram. Selama musim puncak, beberapa pemilik warung sudah menimbun hingga satu ton ikan. Selain itu, pemilik warung juga menambah jumlah pelayan warung hingga 15 hingga 20 orang, sedangkan pada hari biasa, mereka hanya memiliki tiga sampai lima pelayan. Para pelayan mendapatkan bayaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per hari, sedangkan pembantu yang penting mendapatkan bayaran Rp100.000 per hari. Mereka bekerja dari pukul 07.00 sampai 21.00. Umumnya, para pelayan adalah anggota keluarga atau kerabat nelayan, atau tetangga dekat pemilik warung. Terkadang, nelayan lain juga membantu di warung seafood.

Bagi para nelayan, peluang ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan ekowisata bahari sangat membantu situasi ekonomi mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para istri dan kerabat nelayan dapat bekerja sebagai pelayan di warung makanan laut, meskipun peluang yang lebih besar tergantung pada musim liburan. Keberadaan warung-warung ini juga menciptakan peluang bagi pedagang ikan lokal untuk menjadi pemasok ikan. Di sisi lain, keterlibatan nelayan dan keluarganya dalam kegiatan ekowisata laut masih terbatas dan tidak stabil. Kendati demikian, keterlibatan ini mengindikasikan adanya sinergi antar sektor kelautan dalam dinamika perekonomian lokal Dusun Mandaran.

Pembahasan

1. Dinamika paguyuban paku lima

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagaimana munculnya Paguyuban Pakulima pada dasarnya mendorong tumbuhnya pilarisasi masyarakat di Dusun Mandaran. Tentunya hal ini memiliki implikasi yang erat terhadap pembangunan kawasan dusun itu sendiri. Pembangunan kawasan dusun tentunya tidak terlepas dalam fenomena politik, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana kestabilan desa tersebut dari timbulnya konflik. Maka dari itu, akan dibahas satu persatu mengenai elemen yang terkait dengan pembangunan kawasan pada Dusun Mandaran yaitu pola penguasaan tanjung, elit yang berkuasa, dan kontrol sosial.

Pembangunan kawasan pesisir di Dusun Mandaran tentunya tidak terlepas dari bagaimana pola penguasaan kawasan tanjung di Dusun Mandaran sendiri. Daerah Pesisir Dusun Mandaran pada awalnya merupakan daerah yang nyaris tidak dimanfaatkan pengelolaannya oleh masyarakat sekitar. Pada awalnya kawasan pesisir di Dusun Mandaran hanya perkampungan nelayan kecil yang banyak dihuni etnis Mandar dan Madura. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa etnis Mandar pertama kali datang ke Dusun Mandaran biasanya langsung menguasai daerah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Namun pada migrasi berikutnya dan seterusnya, etnis Mandar yang tiba di Besuki tidak hanya tinggal di daerah pesisir dan menjadi nelayan, tetapi mereka mulai menggarap lahan, hal ini dikenal dengan kegiatan “merintis”. Terdapat dua etnis dominan yang menggarap lahan di Dusun Mandaran, yaitu etnis Mandar dan Madura. Kedua etnis ini datang dan tinggal secara berkelompok. Pada saat mereka tiba, belum ada aturan yang jelas mengenai kepemilikan lahan pesisir di Dusun Mandaran, sehingga mereka membuka dan menggarap lahan dan menentukan sendiri batas-batas kepemilikan lahan mereka. Pada masa ini, Paguyuban Pakulima masih berupa kelompok-kelompok kecil yang berperan untuk membantu dan memfasilitasi mereka yang baru datang dan memulai kegiatan “merintis” ini. Bantuan yang diberikan lebih berupa jaringan dan pertukaran informasi serta saling tolong menolong baik secara kesempatan memperoleh akses dalam usaha ini maupun ekonomi.

Seiring berkembangnya Kecamatan Besuki yang pada akhirnya menjadi salah satu pusat Kabupaten Situbondo berdampak pada diperbaikinya sistem administrasi kepemilikan lahan tanjung di kawasan pesisir Dusun Mandaran. Penduduk etnis Mandar dan Madura yang telah menggarap lahan tanjung dan telah menentukan batas-batas kepemilikan lahannya, diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi agar mendapatkan sertifikat hak milik yang sah terhadap lahan tersebut. Sertifikasi tersebut dilakukan secara berkelompok di mana melalui-kelompok-kelompok tersebut terjadi sosialisasi informasi dan kesepakatan bersama terkait sertifikasi lahan tersebut. Selain adanya sertifikasi lahan, kawasan Tanjung di Dusun Mandaran juga menjadi tujuan para transmigran yang didatangkan dari luar Dusun Mandaran dengan tujuan untuk membuka lahan.

Fenomena ini juga terjadi di Dusun Mandaran. Menurut aparat setempat bahwa banyak lahan di Dusun Mandaran selain yang telah digarap oleh etnis Mandar juga diberikan bagi penduduk etnis Madura sebagai lahan dari program pemanfaatan kawasan

peisir pantai. Selebihnya adalah berupa pemberdayaan masyarakat di kawasan tanjung tersebut dimana kawasan tanjung ini dulunya juga dihuni oleh masyarakat di luar Dusun Mandaran. Terkait dengan kepemilikan sertifikasi lahan, masyarakat Mandaran mendapatkan sertifikasi atas lahannya begitu pula orang di luar Dusun Mandaran dengan program transmigrasi, namun masyarakat Mandaran yang telah lama mendiami lahan tersebut harus dikeluarkan dan diberikan tempat tersendiri oleh pemerintah dikarenakan lahan yang mereka huni kini termasuk kawasan pesisir yang telah diberdayakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan aparat setempat yang menyebutkan bahwa pada salah satu RT di Dusun Mandaran didominasi oleh penduduk miskin etnis Mandar dan Madura, mereka dulunya tidak memiliki lahan selain lahan seadanya untuk menanam kebutuhan keluarga disekitar rumah mereka.

Sejak Besuki menjadi salah satu sentral Kabupaten Besuki, tentunya Besuki memiliki rencana pembangunan, pengembangan ekonomi, dan tata ruang dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan. Mereka yang dapat mengakses rencana pemanfaatan lahan yang akan dilakukan pemerintah cenderung akan membeli lahan dari orang-orang sekitar yang pada awalnya menggarap lahan ditempat-tempat yang diketahui akan terkena pembangunan ekonomi. Hal ini seperti informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa tanah-tanah yang tadinya dimiliki penggarap dibeli oleh para pejabat yang didominasi oleh masyarakat Besuki sendiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa pada awalnya memang masyarakat Dusun Mandaran sebagai penggarap kawasan tanjung adalah pemilik awal dari lahan-lahan di sana. Namun masuknya pendatang dari luar Dusun Mandaran melihat lahan tersebut dan berusaha membeli lahan tersebut dengan harga yang murah. Di sinilah terjadi konflik antara masyarakat Mandaran dan masyarakat di luar Mandaran yang ingin memberdayakan kawasan tanjung di daerah pesisir tersebut. Oleh karena itu, para anggota masyarakat Mandaran mulai mendirikan Paguyuban Pakulima.

Paguyuban sebagai wadah berkumpul dan sosialisasi nilai-nilai pada umumnya menjadi sarana tolong-menolong dan saling bertukar informasi. Dimana melalui paguyuban sebagai representasi dari pilarisasi masyarakat masing-masing elit yang memiliki kekuasaan dalam mengakses sumberdaya ekonomi saling menginformasikan dan menolong sesama etnis dengan tujuan peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan mereka. Pada kasus kepemilikan lahan tanjung, terlihat bahwa secara terpolo kepemilikan

lahan di Dusun Mandaran dengan telah disahkannya Sertifikat Paguyuban dari Kemenhumkam.

2. Pengembangan Paguyuban Melalui edu-ekowisata PAIM

Sektor ekowisata perikanan dan kelautan merupakan dua sektor perekonomian lokal di Dusun Mandaran yang berpotensi untuk dikembangkan secara sinergi dan integrasi. Sinergi dan integrasi ini telah terlihat di beberapa desa pesisir. Namun, masing-masing dari kedua sektor ini masih memiliki kelemahan dan perlu perbaikan serius, sehingga kemudian sinergi tersebut akan mampu mendorong kegiatan ekonomi pesisir yang berkelanjutan, menciptakan peluang bisnis baru, serta memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.

Seperti disebutkan dalam penelitian ini, ada beberapa masalah yang ternyata menjadi kelemahan sektor perikanan antara 2015 hingga 2017. Yang pertama adalah menurunnya jumlah ikan yang ditangkap karena kelangkaan sumber daya perikanan. Kedua, adalah kurangnya informasi dari lembaga terkait. Ketiga, adalah kurangnya teknologi di tempat untuk mendeteksi keberadaan sumber daya perikanan. Keempat, adalah biaya operasional, yang cenderung lebih tinggi dari pendapatan nelayan.

Sejak terbentuk pada pertengahan tahun 2018, Paguyuban Paku Lima telah mengadakan berbagai macam edu-ekowisata dengan beragam bentuk yang mengoptimalkan kawasan pantai dan beberapa destinasi sejarah karisedanan yang ada di lingkungan sekitar. Kemasan kegiatan pengembangan paguyuban dengan edu-ekowisata perspektif Pendidikan Agama Islam Multikultural yang dilakukan paguyuban Paku Lima, antara lain:

- a. Wisata dalam bingkai silaturrohim mengunjungi destinasi tempat ibadah terdekat, seperti Masjid Agung Besuki, Kelenteng Besuki, dll.
- b. Wisata kopi pantai dalam bingkai talkshow, seminar, dan pelatihan yang didampingi oleh Dosen Universitas Nurul Jadid (UNUJA) mengulas tentang kajian kebangsaan dan penguatan ekonomi kerakyatan dari sektor wisata
- c. Wisata mengelilingi taman mangrove dengan informasi pengajaran tentang ramah lingkungan (diberikan kepada anak-anak masyarakat Dusun Mandaran Desa Pesisir)
- d. Mengkampanyekan moderasi keagamaan dengan pamflet mutikultural di sekitar lingkungan pantai.
- e. Sholawatan (setiap 2 minggu sekali, tepatnya pada minggu kedua dan minggu ke 4 pada hari senin malam selasa)
- f. Kajian al-Qur'an dan hadits (membaca al-qur'an dan maknanya, membaca hadits dan maknanya) setiap Jum'at Pahing.
- g. Wisata Bulan lomba dalam bingkai peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia

- h. Wisata Pentas seni lokal (setiap malam minggu) sesuai dengan budaya etnis masing-masing.

Untuk memperkuat kelembagaan Paguyuban Paku Lima ini, para anggota paguyuban ini secara reguler mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Kepala Desa, Muspika, tokoh masyarakat dari berbagai etnis, dan masyarakat Mandaran sendiri. Selain itu, anggota Paguyuban mendaftarkan komunitas ini kepada Kemenkumham. Pada tanggal 31 Januari 2020, terbit Akta Pendirian Perkumpulan dengan nama “Masyarakat Peduli Lingkungan Paku Lima Mandaran”

Dalam konsep edu-ekowisata, anggota paguyuban memegang peran kunci, pelibatan penuh setiap elemen masyarakat diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mengelola destinasi wisata. Di Desa Pesisir masih diperlukan pengembangan kapasitas komunitas paguyuban Nelayan untuk mengelola pariwisata dengan lebih maksimal. Menurut penjelasan Ketua Paguyuban Komunitas Nelayan Desa Pesisir bahwa, Paguyuban telah beberapa kali mengikuti pelatihan yang terkait pengelolaan wisata baik dalam hal manajemen wisata. Pelatihan ini ada yang diinisiasi oleh pemerintah dan adapula yang diselenggarakan oleh Universitas Nurul Jadid (UNUJA) sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Namun walaupun demikian tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas Paguyuban yang dituangkan dalam strategi pengembangan wisata Dusun Mandaran.

Untuk mendukung kegiatan yang menjadi agenda kegiatan dan implementasinya, paguyuban mempunyai kesepakatan informal anggota paguyuban untuk secara rutin memberikan santunan kepada anak yatim dari masyarakat sekitar dari beragam rumpun masyarakat, Muslim, Tionghoa, dan masyarakat lokal. Bahkan Paguyuban juga berkontribusi menyediakan fasilitas aliran listrik yang disediakan bagi Masyarakat yang digunakan untuk membuat perahu dan aktivitas lainnya, meskipun masih diminta sumbangan daya listrik sebesar antara Rp. 10.000-15.000/hari. Dinamika pengembangan paguyuban ini mengurangi konflik horizontal dan mengimplemntasikan kerukunan antar etnis dan mengokohkan toleransi bagi masyarakat pesisir secara luas.

Ada beberapa upaya pengembangan kelembagaan yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi kelemahan sektor perikanan. *Pertama*, para nelayan Dusun Mandaran perlu mendapatkan informasi mengenai cuaca atau kondisi iklim, dan tempat yang tepat di mana sumber daya perikanan berasal dari instansi terkait. *Kedua*, adalah agar ada dorongan bagi mereka untuk berlayar dan membantu mereka dalam menangkap ikan. *Ketiga*,

mendorong masyarakat desa untuk melakukan konservasi pesisir dengan menanam mangrove dan mendirikan kawasan lindung laut. *Keempat*, adalah membangun bangunan pemecah gelombang dalam rangka mencegah abrasi laut. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat mengembalikan potensi perikanan lokal di dekat wilayah pesisir yang bersangkutan, meringankan beban nelayan dengan menghemat biaya operasional mereka, dan menyelamatkan desa nelayan dari abrasi.

Selain kelemahan di sektor perikanan, ada juga kelemahan di sektor ekowisata kelautan. Ini adalah kawasan pesisir terbatas yang dapat digunakan sebagai fokus lebih banyak kegiatan ekowisata, terbatasnya fasilitas umum pendukung, dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat berpartisipasi dalam ekowisata. Permasalahan yang muncul belakangan karena keterbatasan wilayah pesisir yang mempengaruhi peluang bagi masyarakat desa untuk membuka usaha baru. Pada tahun 2017, kios-kios makanan laut yang ada telah dikelilingi oleh kolam ikan pengusaha swasta, sementara bagian selatan kios-kios telah digunakan sebagai dermaga kecil untuk perahu nelayan. Dengan demikian, kawasan pesisir yang ada tidak lagi mampu mengakomodasi kegiatan ekonomi baru.

Di Pantai Mandaran, ekowisata laut secara alami telah menciptakan sinergi lintas sektor antara sektor perikanan dan sektor ekowisata laut. Sinergi kelembagaan ini terbukti memberikan dampak positif, oleh karena itu sinergi tersebut membutuhkan lebih banyak dukungan dari institusi desa untuk membantu pengelolaan ekowisata. Pemerintah pusat atau daerah juga telah menunjukkan dukungannya terhadap "otonomi desa" dengan meningkatkan nilai alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Pendanaan ini dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kompeten dalam mengelola potensi ekonomi desa. Alasan di balik keikutsertaan BUMDes adalah (1) bahwa BUMDes mampu mengelola potensi ekonomi desa sesuai dengan undang-undang dan (2) aset tanah yang digunakan untuk pendirian bangunan atau fasilitas ekowisata laut milik pemerintah desa.

BUMDes berpotensi menjadikan ekowisata laut sebagai unit usaha desa yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan pesisir. Strategi umum pengembangan ekonomi lokal adalah bertujuan untuk menciptakan (a) pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja; (b) penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran; dan (c) realisasi mata pencaharian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan aktif dan partisipasi terpadu di antara para pelaku pembangunan misalnya, pemerintah daerah, swasta, dan pelaku pembangunan lainnya, baik lokal maupun daerah sangat dibutuhkan.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan lintas sektoral sebagai bagian dari konsepsi pembangunan daerah terpadu.¹⁵

Aktualisasi pengembangan Paguyuban Paku Lima dengan edu-ekowisata berbasis Pendidikan Islam Multikultural berorientasi pada peningkatan kualitas SDM potensial melalui pelatihan keterampilan dan internalisasi pengetahuan pariwisata dengan berbagai mitra. Mereka juga menggunakan teknologi informasi berbasis Internet untuk mempromosikan dan mendukung pemasaran potensi wisata pantai pesisir. Sinergi pendidikan dan wisata yang dikemas dalam edu-ekowisata ini telah berkontribusi menciptakan ekonomi mandiri, kesejahteraan, dan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi para masyarakat pesisir. Konsepsi pembangunan berbasis kemandirian lokal merekomendasikan pemanfaatan sumber daya alam dan karakteristiknya.¹⁶

Selain menjadi wadah berkumpul dan sosialisasi nilai-nilai kultural antara masyarakat Mandaran dan Madura. Ia merepresentasikan suatu komunitas multikultural yang saling berkonflik namun pada akhirnya mampu dimediasi oleh adanya Paguyuban Pakulima. Akhirnya, Paguyuban Pakulima bukan hanya menjadi wahana peningkatan ekowisata di Dusun Mandaran, namun juga menjadi wahana eduwisata berbasis moderasi beragama dan kultural masyarakat.

Hal itu bisa dilihat dari bagaimana kontribusi komunitas nelayan bernama "Paguyuban Pakulima" dalam penguatan kelembagaan masyarakat pesisir yang multietnis. Paguyuban Pakulima merupakan komunitas nelayan Dusun Mandaran, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang saat ini menjalankan 4 fungsi multisektoral, antara lain:

1. Paguyuban sebagai wadah berkumpulnya masyarakat yang multietnis di Dusun Mandaran, yang terdiri dari etnis Madura dan etnis Mandar
2. Paguyuban sebagai wadah pendidikan keagamaan Islam bagi masyarakat Mandaran yang rata-rata memiliki pengetahuan keagamaan Islam yang rendah
3. Paguyuban sebagai wadah penghubung antara sektor perikanan dan sektor wisata, yang bisa membantu perekonomian masyarakat Mandaran
4. Paguyuban sebagai wadah yang dapat mengurangi konflik horizontal akibat perebutan lahan tanjung yang sudah lama tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar.

¹⁵ Dendi A, Heile HJ, Mahman, Hilaliyah R, & Haryono RS (2004) *Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal: Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Laporan Penelitian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.

¹⁶ Amien AM (2005) *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia.

Penutup

Paguyuban Paku Lima di Dusun Mandaran merupakan salah satu komunitas masyarakat nelayan dengan keterbatasan kesejahteraan sosial ekonomi. Upaya semata-mata bergantung pada penangkapan ikan untuk mendukung kehidupan mereka, dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tidak lagi dapat diandalkan terus menerus. Hal ini disebabkan oleh kondisi potensi sumber daya perikanan di Selat Bali yang mulai menurun drastis sejak 2015. Di sisi lain, peluang ekonomi baru di sektor off-fishing sangat terbatas, sehingga tidak dapat diharapkan dapat membantu rumah tangga nelayan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kurangnya pemahaman tentang multikultural juga menyebabkan permasalahan horizontal antar nelayan, dan dengan masyarakat secara luas.

Selain itu, pengembangan kelembagaan sektor ekowisata kelautan di Dusun Mandaran juga perlu bersinergi dengan sektor perikanan untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat nelayan. Meskipun nilai positif dari sinergi tersebut, setiap sektor masih perlu pembenahan. Sektor ekowisata kelautan membutuhkan penataan ulang ekowisata laut lokal, penyediaan fasilitas umum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ekowisata. Sementara itu, sektor perikanan membutuhkan penyediaan informasi iklim, potensi detektor posisi sumber daya ikan dan bantuan terkait bersarangnya ikan (rumpon), konservasi ekosistem pesisir dan laut, serta pembangunan breakwater untuk mencegah abrasi pantai.

Kegiatan edu-ekowisata di Pantai Mandaran telah menciptakan peluang bagus bagi para anggota paguyuban dan masyarakat nelayan secara luas untuk berpartisipasi di dalamnya. Kendati demikian, jumlah warga yang terlibat pada 2017 masih terbatas. Bahkan, para nelayan menginginkan lebih banyak peluang untuk terlibat aktif dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, terutama dengan membuka usaha baru sebagai bagian dari diversifikasi pekerjaan, namun minim dalam keterlibatan aktivitas edukasi multikultural mengingat keterbatasan ruang pendidikan di kawasan pesisir. Oleh karena itu, berbagai strategi perbaikan dalam konteks pengembangan komunitas Nelayan dengan edu-ekowisata diperlukan untuk berkontribusi membuka lebih banyak peluang kerja, meningkatkan kesadaran keagamaan dengan pendekatan multikultural, dan mengatasi masalah horizontal kemasyarakatan. Apalagi keberadaan paguyuban dan aktivitasnya diharapkan untuk meningkatkan pengelolaan potensi ekowisata pesisir secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, masyarakat Dusun Mandaran masih membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, mitra usaha, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan ekonomi pesisir, berdasarkan sinergi dan

integrasi, membutuhkan dukungan potensi sumber daya yang besar. Strategi penguatan kelembagaan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum, untuk mengatasi kemiskinan yang dialami oleh para nelayan, untuk menjaga mata pencaharian masyarakat, serta menjaga stabilitas pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, menjadi tanggung jawab mendasar pemerintah dan negara untuk memperhatikan hak rakyat untuk memiliki kehidupan yang layak dan makmur. Kehadiran partisipasi pemerintah memperkuat masyarakat desa yang telah mampu menghadapi perubahan sosial ekonomi yang dipicu oleh percepatan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Cole S (1998) Tradition and tourism, dilemmas in sustainable tourism development: A case study from the Ngada Region of Flores, Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 1998.
- Damanik J, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Sari Konsep Menuju Implementasi. In: J Damanik, HA Kusworo, & DT Raharjana (eds). *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Ismail Z, *Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: P2E-LIPI, 2003.
- Kusnadi, Jaringan Sosial sebagai Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan: Studi Kasus di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. *Tesis*, Program Studi Antropologi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Kusnadi, Membangun Desa Pesisir Membangun Negara Maritim Indonesia. In: A Abdulrahkim. *Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Kusnadi & Sumarijono (2016) *Paradoks Revolusi Biru: Perspektif Teori Involusi Clifford Geertz*. Jember: Laporan Penelitian Fundamental DP2M, Universitas Jember.
- Little D, *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science*. Oxford: Westview Press, 1991.
- Muhammad Y (2016) *Nasib Nelayan di Hari Nelayan Nasional*. [Accessed 2 March 2018]. <http://beritagar.id/artikel/berita/nasibnelayan>.
- Muqtafa MK & Nadila SM (2011) Climate change dan dampaknya terhadap komunitas nelayan dan masyarakat hutan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 13:151-167.
- Perry RI, Potential impacts of climate change on marine wild capture fisheries: An update. *Journal of Agricultural Science*, 2010.
- Rogelja N, The ethnography of local tourism: Connections between fishery and tourism in Izola. *Journal of Maritime Anthropological Studies*, 1 2002.
- Suyanto B, *Dampak Motorisasi dan Komersialisasi Perikanan terhadap Perubahan Tingkat Pendapatan, Pola Bagi Hasil, dan Munculnya Polarisasi Sosial Ekonomi di Kalangan Nelayan Tradisional dan Nelayan Modern*. Jakarta: Laporan Penelitian untuk YIIS, 1993.
- Tingsabadh C, Pengembangan Pariwisata dan Pengurangan Kemiskinan di Thailand. In: J Damanik, HA Kusworo, & DT Raharjana (eds). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Yunus HS, *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Widodo S, *Nelayan dan Kemiskinan*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Press, 2012.